

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ada banyak pemahaman tentang kemiskinan. Dari segi kemiskinan absolut, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan material dasar secara layak serta kegagalan untuk mencapai tingkat kelayakan minimum. Pemahaman ini berhubungan dengan kemiskinan material. Padahal bila kita membicarakan tentang kemiskinan, ia tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material dasar saja, tetapi juga berhubungan dengan berbagai dimensi lainnya seperti kesehatan, pendidikan, budaya, jaminan masa depan dan peranan social (Sumodiningrat, 2009:120).

Masalah kemiskinan di suatu wilayah akan menjadi hambatan utama dalam pembangunan jika tidak segera diprioritaskan penanggulangannya. Dalam menanggulangi kemiskinan permasalahan yang dihadapi bukan hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut pemahaman sebab akibat timbulnya kemiskinan melainkan juga melibatkan preferensi, nilai dan politik. Meningkatnya angka kemiskinan memerlukan perhatian yang lebih serius dari seluruh pelaku pembangunan untuk mengatasinya (Suharto,2007;97).

Kemiskinan adalah fenomena yang bukan saja terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di sebagian besar negara-negara berkembang di dunia. Kemiskinan telah menjadi suatu fenomena sosial yang selalu berkembang dan telah menjadi masalah multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan karena

substansi kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan dan papan.

Keterlibatan pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis dengan menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program/kegiatan pembangunan secara terpadu, antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka. Melalui upaya terpadu ini, diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupannya serta membantu dan memberdayakan mereka dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensinya masing-masing. Dengan demikian setiap kebijakan pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat, hendaknya dilaksanakan secara terarah pada suatu penciptaan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah hanya sebagai pengatur, pendorong dan penyedia.

Berkaitan dengan permasalahan kemiskinan, sebagai gambaran umum kondisi masyarakat pasca krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia menunjukkan terjadinya peningkatan masyarakat miskin yang ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan makan (pangan), pakaian (sandang), pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dampak sosial dari krisis ekonomi juga menimbulkan meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan-perusahaan yang terpuruk dalam

pengadaan faktor produksi. Pengangguran ini dapat menimbulkan kemiskinan. Berkembangnya fenomena kemiskinan akibat krisis yang berkepanjangan membutuhkan intervensi pemerintah yang komprehensif.

Di Kabupaten Gorontalo, karakteristik utama dan penyebab utama kemiskinan pada wilayah miskin mencakup sumber daya alam, teknologi dan unsur pendukungnya, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana termasuk kelembagaan. Sasaran langkah-langkah penanggulangan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari sumber-sumber penggeraknya melalui peningkatan mutu sumberdaya, perbaikan teknologi, maupun efektivitas koordinasi dari faktor-faktor tersebut melalui penyempurnaan kelembagaan/organisasi sosial ekonomi di masing-masing wilayah. (BPMD Kabupaten Gorontalo, 2010:7).

Kelompok yang paling terkena dengan kemiskinan adalah wanita dan anak-anak. Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai upaya untuk menjamin kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, serta percepatan pembangunan pedesaan, perkotaan, kawasan pesisir, dan kawasan tertinggal. Masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pemerintah provinsi Gorontalo dalam salah satu programnya terus berusaha menekan angka kemiskinan, termasuk di dalamnya mengurangi pengangguran di rumah tangga miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut setidaknya ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan yaitu kapasitas manajemen pemerintah daerah, alokasi sumber daya yang efektif dan efisien, dan output yang relevan dengan kebutuhan penanggulangan kemiskinan (Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo 2011:12).

Dalam kaitan itu, melalui Yayasan Damandiri melahirkan konsep strategis pemberdayaan masyarakat dengan nama Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang secara nasional telah dideklarasikan pada November 2006 silam sebagai pusat pengembangan swadaya masyarakat di tingkat akar rumput. (Pedoman Posdaya, 2009:3).

Secara khusus, sasaran bidang kependudukan dan Keluarga Berencana yang akan dicapai pada akhir tahun 2014 adalah Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, diamanatkan bahwa sasaran umum pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang akan dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang didukung dengan menurunnya *Net Reproduction Rate* (NRR) = 1,0; dan makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa.

Kelahiran Posdaya diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang; serta makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa. Pencapaian sasaran tersebut, ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH).

Kondisi penyelenggaraan pos pemberdayaan keluarga (posdaya) masih membutuhkan perhatian dalam pengelolaannya. Masalah yang dihadapi oleh gerakan posdaya yaitu, kurangnya pemahaman remaja perempuan dan laki-laki usia 15-24 tahun yg tahu tentang masa subur baru mencapai 29% dan 32,3%. Remaja perempuan dan laki-laki yang mengetahui risiko kehamilan jika melakukan hubungan seksual sekali masing-masing baru mencapai 49,5% dan 45,5%.

Remaja perempuan dan remaja laki-laki usia 14-19 thn mengaku mempunyai teman pernah melakukan hubungan seksual pra nikah masing-masing mencapai 34,7% dan 30,9%. Remaja perempuan dan laki-laki usia 20-24 tahun yang mengaku mempunyai teman pernah melakukan hubungan seksual pra nikah masing-masing mencapai 48,6% dan 46,5 %. Jumlah kasus HIV dan Aids di Indonesia yang dilaporkan hingga bulan Maret 2009 dimana separoh dari kasus Aids ini adalah kelompok remaja (umur 15-19=2,7%, umur 20-29= 4,7%). 3,2 juta penduduk Indonesia didapati sebagai penyalahgunaan NAPZA, 78 %, diantaranya adalah remaja kelompok umur 20-29 tahun. (Buku Rakerda BKKBN Provinsi Gorontalo, 2011:89)

Respon masyarakat terhadap posdaya cukup bagus, remaja perempuan dan laki-laki usia 15-24 tahun yang tahu tentang masa subur baru mencapai 11,2% dan 2,5% remaja perempuan dan laki-laki usia 15-24 tahun yang mengetahui resiko kehamilan jika melakukan hubungan seksual sekali saja masing-masing mencapai 37,6% dan 39,8%. Remaja perempuan dan laki-laki usia 14-19 tahun yang mengaku mempunyai teman yang pernah melakukan hubungan seksual pra nikah masing-masing mencapai 34% dan 31% sedangkan remaja usia 15-19 tahun yang setuju dengan seksual sebelum menikah karena menyukai hubungan seksual itu sendiri adalah 16,5%. Sedangkan alasan karena mencintai mencapai 16%, serta alasan karena ingin menunjukkan rasa saling mencintai adalah 13,3%.

Permasalahan yang dihadapi dari sikap masyarakat antara lain, masih rendahnya partisipasi dalam pembangunan, keterbatasan dalam mengambil keputusan, adanya diskriminasi, terbatasnya akses, rendahnya tingkat pendidikan, angka kematian ibu, dan buta aksara (SDKI 2007).

Upaya yang telah dan sedang dilaksanakan dalam mengatasi masalah di atas melalui penerapan program-program posdaya seperti, pemberian bantuan modal simpan pinjam, kesehatan lingkungan, budidaya tanaman local, dan pengembangan kewirausahaan bengkel mandiri.

Sikap masyarakat terhadap pengelolaan posdaya, ditunjukkan dengan keterlibatannya masyarakat dalam program-program posdaya. Untuk merespon permasalahan di atas penelitian ini berjudul sikap masyarakat terhadap pengelolaan Posdaya di desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini dirumuskan bagaimana sikap masyarakat terhadap pengelolaan Posdaya di desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan sikap masyarakat terhadap pengelolaan Posdaya (pos pemberdayaan keluarga) di desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penelitian terapan dalam bidang pendidikan non formal.
2. Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dalam kaitannya dengan sikap masyarakat terhadap pengelolaan Posdaya di desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah.
2. Sebagai bahan atau landasan untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan, khususnya dalam sikap masyarakat terhadap pengelolaan Posdaya di desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

